



**IKHTISAR LHKPN a.n JARIR**  
**(Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Awal Menjabat) – 2021)**  
**NIK 1503060503650002**

**1. DATA PRIBADI**

Nama	: JARIR
NIK	: 1503060503650002
No KK	: 1503060102100001
NPWP	: 14.338.244.8-333.000
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: MANDIANGIN/5 Maret 1965
Status Nikah	: Menikah
Agama	: ISLAM
Alamat	: Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, MANDIANGIN TIMUR, SAROLANGUN, JAMBI
Nomor Handphone	: 085311686137
Email	: jarirjarir99@gmail.com
NHK	: -
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
Jabatan	: CAMAT - KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR - KECAMATAN
Tanggal Lapor	: 31 Desember 2021
Tanggal Kirim	: -
Status	: Draft



**2. DATA KELUARGA**

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	HAZIZAH	ISTRI	JAMBI , 16 Februari 1970 / PEREMPUAN	PNS	Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
2	M.FAJAR RIKSANDY	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 22 Agustus 1996 / LAKI-LAKI	SWASTA	Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
3	QONITA SALSABILA	ANAK TANGGUNGAN	JAMBI , 17 April 2003 / PEREMPUAN	-	Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
4	M.AULIA RACHMAN	ANAK TANGGUNGAN	SAROLANGUN , 4 September 2008 / LAKI-LAKI	-	Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

**3. JABATAN**

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	CAMAT	PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN	KECAMATAN	KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR

**4. DATA HARTA**

**4.1. TANAH / BANGUNAN**

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : SAROLANGUN JAMBI Kel. / Desa : TAMAN DEWA Kecamatan : MANDIANGIN Kab. / Kota : SAROLANGUN Prov. / Negara : JAMBI / INDONESIA	Tanah: 10.000 m <sup>2</sup> Bangunan: 10.000 m <sup>2</sup>	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: SERTIKAT Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 1977	Rp. 0	Rp. 150.000.000	-



NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 150.000.000	

#### 4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : HONDA SCOPY Tahun Pembuatan : 2013 No. Pol. / Registrasi : BH 3432 YM	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: LAINNYA (M.FAJAR RIKSANDY) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: M.FAJAR RIKSANDY Tahun Perolehan: 2013	Rp. 0	Rp. 5.000.000	-
Sub Total				Rp. 5.000.000	

#### 4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

#### 4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	



4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
Sub Total				Rp. 0	Rp. 0

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 7.513.944	Rp. 5.234.400
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 11.000.000	Rp. 540.000
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 7.513.944	Rp. 5.234.400
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 26.027.888	Rp. 11.008.800

**5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN**

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

**5.3. PENERIMAAN LAINNYA**

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
----	------------------	----------------------



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

## 6. PENGELUARAN

### 6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 4.500.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 0
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 2.400.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 1.000.000
Sub Total		Rp. 7.900.000



**6.2. PENGELUARAN HARTA**

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 1.000.000
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 500.000
Sub Total		Rp. 1.500.000

**6.3. PENGELUARAN LAINNYA**

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

**7. LAMPIRAN FASILITAS**

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------



**8. TOTAL HARTA KEKAYAAN**

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 155.000.000	Rp. 0	Rp. 155.000.000

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id) serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.